



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jalan Syech Nawawi Al Bantani, Palima Serang Banten Telepon (0254) 267005,
Laman perkim.bantenprov.go.id, Pos-el perkim@bantenprov.go.id, Kode Pos 42171

SURAT KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI BANTEN**

NOMOR : 8.000.7.2.7/SK.18.1/Perkim/2025
TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI BANTEN
TAHUN 2025**

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI BANTEN**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 7) ;

3. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8);
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2025;
5. Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten 2025-2029;
6. Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten.

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencan Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten 2025-2029.


KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Banten dan ditetapkan dalam keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang

Pada tanggal 14 Januari 2025

KEPALA DINAS

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M. Rachmat Rogianto', written over the printed name below.

M. RACHMAT ROGIANTO

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN**

NOMOR :
TANGGAL :

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI BANTEN
TAHUN 2025**

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL																																
Meningkatnya Rumah Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Persentase Rumah Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	<p>- Baseline data berdasarkan RKPD Kab/Kota, RPJMD Kab/Kota, Open Data Kab. Tangerang, Data Tangsel, Sikondang Kota Serang, dan BPS. Total jumlah rumah di Provinsi Banten di perkirakan sebanyak 2.943.491 unit rumah. 'Persentase yang menggambarkan peningkatan capaian rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan. Capaian rumah layak huni yang dihitung dalam persentase tersebut adalah rumah layak huni yang dibangun dan di rehabilitasi/di perbaiki/di tingkatkan kualitasnya dengan anggaran APBN, APBD Tk. I, APBD Tk. II, dan Pengembang.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Persentase BPS</th> <th>Jumlah Rumah Tangga dengan Hunian Layak</th> <th>Peningkatan per Tahun</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2024</td> <td>64.94%</td> <td>2,107,964</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>65.44%</td> <td>2,124,194</td> <td>16,230</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>65.94%</td> <td>2,140,424</td> <td>16,230</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>66.44%</td> <td>2,156,654</td> <td>16,230</td> </tr> <tr> <td>2028</td> <td>66.94%</td> <td>2,172,884</td> <td>16,230</td> </tr> <tr> <td>2029</td> <td>67.44%</td> <td>2,189,115</td> <td>16,230</td> </tr> <tr> <td>2030</td> <td>67.94%</td> <td>2,205,345</td> <td>16,230</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	Persentase BPS	Jumlah Rumah Tangga dengan Hunian Layak	Peningkatan per Tahun	2024	64.94%	2,107,964		2025	65.44%	2,124,194	16,230	2026	65.94%	2,140,424	16,230	2027	66.44%	2,156,654	16,230	2028	66.94%	2,172,884	16,230	2029	67.44%	2,189,115	16,230	2030	67.94%	2,205,345	16,230
Tahun	Persentase BPS	Jumlah Rumah Tangga dengan Hunian Layak	Peningkatan per Tahun																															
2024	64.94%	2,107,964																																
2025	65.44%	2,124,194	16,230																															
2026	65.94%	2,140,424	16,230																															
2027	66.44%	2,156,654	16,230																															
2028	66.94%	2,172,884	16,230																															
2029	67.44%	2,189,115	16,230																															
2030	67.94%	2,205,345	16,230																															
Meningkatnya penataan kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi yang Ditangani	<p>(Mengacu Permen PUPR 14/2018) • Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. • Peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan, serta Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dengan pola penanganan pemugaran, peremajaan, atau pemukiman kembali. (Mengacu Permen PUPR 7/2022) • Peningkatan kualitas RTLH adalah penanganan untuk memperbaiki fasad rumah dan eksterior bangunan guna mengubah tampilan lingkungan permukiman dan/atau mendukung penanganan kawasan permukiman kumuh. (Mengacu UU Nomor 23 Tahun 2014)</p>																																
Terpenuhinya penyediaan PSU permukiman	Persentase penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) permukiman	Penyediaan unit PSU Permukiman diukur dengan capaian jumlah unit penyediaan PSU Permukiman se Provinsi Banten pada Tahun n																																
Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan	Persentase Administrasi Pertanahan yang Tertib sesuai Ketentuan	Indikator ini menjelaskan terkait capaian dari administrasi pertanahan agar tertib sesuai ketentuan																																

**INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN
APBD TAHUN 2025**

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah
KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Nilai AKIP Perangkat Daerah
KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun sesuai SAP (Standar akuntansi pemerintahan)
KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Persentase Barang Milik Daerah yang tertib pencatatan dan fisik
KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase ASN perangkat daerah yang memiliki predikat SKP minimal BAIK
KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase kegiatan layanan administrasi umum yang dilaksanakan sesuai standar dan jadwal
KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor sesuai daftar kebutuhan standar
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Realisasi Pelayanan Penunjang Sesuai Jadwal
KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara dan dalam Kondisi Baik
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni
	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni
KEGIATAN PENDATAAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PROVINSI	Persentase Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
KEGIATAN SOSIALISASI DAN PERSIAPAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PROVINSI	Persentase Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PROVINSI	Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
KEGIATAN PENDISTRIBUSIAN DAN SERAH TERIMA RUMAH BAGI KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PROVINSI	Persentase Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10 - 15 Ha yang Ditangani
KEGIATAN PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS 10 (SEPULUH) HA SAMPAI DENGAN DI BAWAH 15 (LIMA BELAS) HA	Persentase Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS 10 (SEPULUH) Ha SAMPAI DENGAN DI BAWAH 15 (LIMA BELAS) Ha	Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)
KEGIATAN URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERMUKIMAN	Persentase penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) permukiman
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI,	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta

DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU
KEGIATAN SERTIFIKASI DAN REGISTRASI BAGI ORANG ATAU BADAN HUKUM YANG MELAKSANAKAN PERENCANGAN DAN PERENCANAAN RUMAH SERTA PERENCANAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PSU TINGKAT KEMAMPUAN MENENGAH	Persentase fasilitasi Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Diselesaikan Tepat Waktu
KEGIATAN PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI WILAYAH PROVINSI	Persentase Persiapan Penetapan Lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Diredistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
KEGIATAN PENETAPAN SUBYEK DAN OBYEK REDISTRIBUSI TANAH LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	Persentase Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota
KEGIATAN PERENCANAAN PENGGUNAAN TANAH YANG HAMPARANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi

KEPALA DINAS

M. RACHMAT ROGIANTO

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR SASARAN	RUMUS PERHITUNGAN	DEFINISI OPERASIOAL	SUMBER DATA
1	2	3	3	4	5	6
	<p>Terpenuhinya Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan serta Terciptanya Keadilan dalam Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah</p>	<p>Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan</p>				
1	<p>Meningkatnya Rumah Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan</p>	<p>Persentase Rumah Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan</p>	<p>66.70%</p>	<p>= Jumlah rumah yang layak terjangkau dan berkelanjutan/Jumlah rumah di Provinsi Banten</p>	<p>- Baseline data berdasarkan RKPD Kab/Kota, RPJMD Kab/Kota, Open Data Kab. Tangerang, Data Tangsel, Sikondang Kota Serang, dan BPS. Total jumlah rumah di Provinsi Banten di perkirakan sebanyak 2.943.491 unit rumah. 'Persentase yang menggambarkan peningkatan capaian rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan. Capaian rumah layak huni yang dihitung dalam persentase tersebut adalah rumah layak huni yang dibangun dan di rehabilitasi/di perbaiki/di tingkatkan kualitasnya dengan anggaran APBN, APBD Tk. I, APBD Tk. II, dan Pengembang.</p>	<p>Dinas Perkim</p>

2	Meningkatnya penataan kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi yang Ditangani	2.33%	= Luas kawasan kumuh kewenangan Provinsi di Tahun 2025/Total luas kawasan kumuh kewenangan Provinsi	<p>(Mengacu Permen PUPR 14/2018) ● Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.</p> <p>● Peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan, serta Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dengan pola penanganan pemugaran, peremajaan, atau permukiman kembali.</p> <p>(Mengacu Permen PUPR 7/2022) ● Peningkatan kualitas RTLH adalah penanganan untuk memperbaiki fasad rumah dan eksterior bangunan guna mengubah tampilan lingkungan permukiman dan/atau mendukung penanganan kawasan permukiman kumuh.</p> <p>(Mengacu UU Nomor 23 Tahun 2014)</p>	Dinas Perkim
3	Terpenuhinya penyediaan PSU permukiman	Persentase penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) permukiman	100%	= Jumlah unit penyediaan PSU Permukiman di Tahun N/Jumlah Total rencana unit penyediaan PSU Permukiman pada Tahun 2025 X 100	Penyediaan unit PSU Permukiman diukur dengan capaian jumlah unit penyediaan PSU Permukiman se Provinsi Banten pada Tahun n	Dinas Perkim

		Indeks Tertib Administrasi Pertanahan				
4	Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan	Persentase Administrasi Pertanahan yang Tertib sesuai Ketentuan	100%	= Jumlah fasilitasi administrasi persiaan tanah dan administrasi penyediaan Tanah Obyek Landreform (TOL) yang tertib dan selesai tepat waktu pada tahun 2025/Jumlah total fasilitasi administrasi persiaan tanah dan administrasi penyediaan Tanah Obyek Landreform (TOL) yang tertib dan selesai tepat waktu pada tahun 2025 X 100	Indikator ini menjelaskan terkait capaian dari administrasi pertanahan agar tertib sesuai ketentuan	Dinas Perkim

Serang, 2025

**Kepala Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Banten**


M. RACHMAT ROGIANTO, ST, MT
NIP. 19710720 200212 1 004